

RENCANA KERJA (RENJA)



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN BANJARBARU UTARA**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya akhirnya Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja (RENJA) 2022 ini di buat sebagai pedoman kerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2022, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.

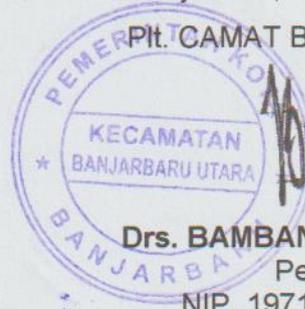
Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2012 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA 2022 ini, kami menyadari bahwa RENJA 2022 ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kebaikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi menyempurnakan RENJA 2022 ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, semoga RENJA 2022 ini dapat bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan.

Banjarbaru, Maret 2021

Pt. CAMAT BANJARBARU UTARA



Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT

Pembina Tk.I

NIP. 197104101990031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	14
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	15
3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V. PENUTUP	20

LAMPIRAN

Lampiran Evaluasi Renja Kecamatan Banjarbaru Utara Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2021

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2016-2021

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Banjarbaru Utara

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kecamatan Banjarbaru Utara

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Tabel 5. Rumusan Program Dan Kegiatan Pada Renja SKPD 2022 Dan Prakiraan
Maju Tahun 2023

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Secara yuridis keberadaan Kecamatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari adanya birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai salah satu Kecamatan dalam Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru perlu membuat Rencana kerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan Kecamatan Banjarbaru Utara.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen resmi agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai. Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Tahun 2022 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Banjarbaru, dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Banjarbaru serta Visi Misi Walikota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 43, Tambahan lembaran Negara RI No. 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2015;
10. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara RI Nomor 4355);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara RI Tahun 2011 No. 310);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Banjarbaru utara dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun 2022 yang akan datang.
- b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Banjarbaru Utara dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun 2022 yang akan datang.
- c. Memberikan acuan bagi Kecamatan Banjarbaru Utara dalam menyusun sasaran kegiatan periode satu tahun 2022 pada tahun yang akan datang.

Adapun Tujuan utama dari pembuatan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah :

- a. Menjadi pedoman untuk menjalankan program dan kegiatan bagi Kecamatan Banjarbaru Utara pada tahun 2022 yang akan datang.
- b. Menjadi pedoman untuk melaksanakan target indikator kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara 2022 yang akan datang.
- c. Menjadi pedoman untuk mencapai sasaran kerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2022 yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan tahun ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD dan review terhadap Rancangan Awal RKPD yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi, komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kota Banjarbaru.

Pelaporan rencana kerja ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Sistematika Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usul Program dan kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD

Bab V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2016-2021 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Misal : penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target SKPD, antara lain karena:

- a. Terlambatnya pengesahan anggaran.
- b. Perubahan harga satuan barang.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD, Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra SKPD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra SKPD.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra SKPD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

Berikut ini disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2021 (Lampiran 1).

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Banjarbaru Utara
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2021**

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SOPD Tahun 2021		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja SOPD)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi anggaran Renstra SOPD s/d tahun 2021		Unit SOPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14=13/5x100%		15	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	6.141.087.550			100%	6.141.087.550	17%	1.039.154.347	1.714.035.644							45%	2.753.189.991					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	100%	17.000.000			100%	17.000.000	10%	1.703.000	3.507.000							31%	5.210.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	9.500.000			100%	9.500.000	5%	433.500	1.898.000							25%	2.331.500					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100%	7.500.000			100%	7.500.000	17%	1.269.500	1.609.000							38%	2.878.500					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Penatausahaan Aset dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Perundang-undangan	100%	5.824.941.550			100%	5.824.941.550	17%	1.008.197.129	1.653.491.723							46%	2.661.688.852					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.807.366.550			100%	5.807.366.550	17%	1.006.987.129	1.652.891.723							46%	2.659.878.852					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Aset/barang Daerah	100%	10.000.000			100%	10.000.000	0%	-	-							0%	-					
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	7.575.000			100%	7.575.000	16%	1.210.000	600.000							24%	1.810.000					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	154.953.000			100%	154.953.000	7%	10.144.000	35.223.900							0%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	20.000.000			100%	20.000.000	0%	-	9.817.500							49%	9.817.500					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	15.000.000			100%	15.000.000	0%	-	6.445.100							43%	6.445.100					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	2.460.000			100%	2.460.000	8%	205.000	820.000							42%	1.025.000					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	82.500.000			100%	82.500.000	12%	9.939.000	11.944.000							27%	21.883.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	34.993.000			100%	34.993.000	0%		6.197.300							18%	6.197.300					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	103.200.000			100%	103.200.000	19%	19.110.218	21.813.021							40%	40.923.239					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	64.800.000			100%	64.800.000	20%	12.710.218	12.213.021							38%	24.923.239					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	38.400.000			100%	38.400.000	17%	6.400.000	9.600.000							42%	16.000.000					

2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	40.993.000		100%	40.993.000	0%	0		12.763.351				31%	12.763.351										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam Kondisi baik	100%	20.000.000		100%	20.000.000	0%	-		7.747.542				39%	7.747.542										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	14.993.000		100%	14.993.000	0%	-		5.015.809				33%	5.015.809										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	2.000.000		100%	2.000.000	0%	-		-				0%	-										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	4.000.000		100%	4.000.000	0%	-		-				0%	-										
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		1.030.002.000	0%	100%	1.030.002.000	37%	377.920.000	62%	639.192.000	0%	0	0%	0	99%	1.017.112.000									
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			985.606.000			985.606.000	19%	188.960.000		311.126.000				51%	500.086.000										
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	985.606.000		100%	985.606.000	19%	188.960.000	32%	311.126.000	0%	0%		51%	500.086.000										
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			44.396.000			44.396.000	0%	0		840.000				0%											
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	100%	4.320.000		100%	4.320.000	0%	-	19%	840.000	0%	0%		19%	840.000										
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	25.876.000		100%	25.876.000	0%	-	37%	9.460.000	0%	0%		37%	9.460.000										
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	100%	14.200.000		100%	14.200.000	0%	-	41%	5.800.000	0%	0%		41%	5.800.000										
Rata-rata capaian kinerja (%)															37%											
Predikat Kinerja																										
JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM				7.171.089.550			7.171.089.550	20%	1.417.074.347	33%	2.353.227.644	0%	-	0%	-	53%	3.770.301.991									
JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM				7.171.089.550			7.171.089.550	20%	1.417.074.347	33%	2.353.227.644	0%	-	0%	-	53%	3.770.301.991									

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah 2020	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SOPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra s/d Tahun 2019 (akhir tahun pelaksanaan Renja SOPD Tahun 2020)	Tingkat capaian Kinerja dan realisasi anggaran Renstra SOPD s/d tahun 2021	Unit SOPD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14= 13/5x100%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KELURAHAN MENTAOS				334.546.670	0	334.546.670	14%	47.555.182	0%	0	0%	0	0%	0	14%	47.555.182	0	
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		100%	334.546.670	-	100%	334.546.670	7%	23.777.591	0%	0	0%	0	7%	23.777.591		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	105.437.670		100%	105.437.670	13%	13.685.000	0%	0	0%	0	13%	13.685.000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	101.750.000		100%	101.750.000	0%	-	0%	0	0%	0	0%	-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	73.800.000		100%	73.800.000	11%	7.767.591						7.767.591		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	53.559.000		100%	53.559.000	4%	2.325.000	0%	0	0%	0	4%	2.325.000		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												14%	47.555.182					
Predikat Kinerja																		
KELURAHAN SUNGAI ULIN				327.688.455	0	327.688.455	6%	19.819.970	0%	0	0%	0	0%	0	6%	39.639.940	0	
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		100%	327.688.455	-	100%	327.688.455	6%	19.819.970	0%	0	0%	0	6%	19.819.970		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	110.328.455		100%	110.328.455	8%	8.869.500	0%	0	0%	0	8%	8.869.500		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	105.500.000		100%	105.500.000	0%	-	0%	0	0%	0	0%	-		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60.600.000		100%	60.600.000		6.418.059						6.418.059		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	51.260.000		100%	51.260.000	9%	4.532.411	0%	-	0%	0	9%	4.532.411		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												12%	39.639.940					
Predikat Kinerja																		

Banjarbaru, April 2021
Pit. Camat Banjarbaru Utara,

Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT
NIP. 19710410 199003 1 003

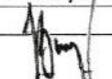
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Tabel 2										
2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Banjarbaru Utara dan										
3	dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020										
4	Kota Banjarbaru										
5											
6	SKPD : KANTOR KECAMATAN BANJARBARU UTARA										
7	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
8						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
10	4.01.4.01.6.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal								
11	4.01.4.01.6.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermatrai	-	-	0	2.865 lembar	-	0	0	0,00%
12	4.01.4.01.6.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100,00%
13	4.01.4.01.6.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100,00%
14	4.01.4.01.6.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Kantor yang disediakan	47 jenis	47 jenis	50 jenis	175 jenis	100%	12 bulan	12 bulan	100,00%
15	4.01.4.01.6.01.11	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100,00%
16	4.01.4.01.6.01.13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan & Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	9 Jenis & 28 Jenis	9 Jenis & 28 Jenis	38 Jenis	123 Jenis	100%	12 bulan	12 bulan	57,21%
17	4.01.4.01.6.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100,00%
18	4.01.4.01.6.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang Disediakan Makanan dan Minuman	6.336 OH, 471 Kotak	6.336 OH, 471 Kotak	7.744 Kotak	31.518 Kotak	100%	12 bulan	12 bulan	90,00%
19	4.01.4.01.6.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	37 OK	37 OK	30 OK	173 OK	100%	38 Orang	38 Orang	72,50%
20	4.01.4.01.6.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Tenaga Non PNS yang Terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	17 Orang	17 Orang	100,00%
21											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
22	4.01.4.01.6.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Keluhan Pengaduan layanan Internal Yang Ditindak Lanjuti								
23	4.01.4.01.6.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	18 jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100,00%
24	4.01.4.01.6.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	17 jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100,00%
25	4.01.4.01.6.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	-	11 jenis	100%	3 Jenis	1 Jenis	100,00%
26	4.01.4.01.6.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	-	-	-	15 paket	100%	-		100,00%
27	4.01.4.01.6.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100%	1 Unit	1 Unit	100,00%
28	4.01.4.01.6.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Rutin/Berkala	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	8 Unit	8 Unit	100,00%
29	4.01.4.01.6.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	12 Buah	12 Buah	2 Jenis	32 buah	100%	1 Jenis	1 Jenis	50,79%
30	4.01.4.01.6.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin Berkala	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	18 jenis	100%	5 Jenis	2 Jenis	33,33%
31	4.01.4.01.6.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dipelihara	-	-	-	22 buah	100%	-	-	100,00%
32	4.01.4.01.6.02.42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100,00%
33											
34	4.01.4.01.6.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Penatausahaan Aset, Perencanaan dan Keuangan Sesuai Perundang-undangan								
35	4.01.4.01.6.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
36	4.01.4.01.6.06.09	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah dan Jenis Pelaporan Manajemen Aset Barang Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
37											
38	4.01.4.01.6.28	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	80,37%	85%	82,33%		85%	90,75%	106,76%
39		Pembinaan penyelenggaraan pemerintah	1. Presentasi Pembuatan KTP Online	4 Kelurahan	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	100%	-	-	100,00%
40			2. Presentase Laporan Kegiatan Kecamatan Terintegrasi Online	4 Kelurahan	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	100%	-	-	100,00%
41			3. Pembuatan - Pembuatan Dokumen Perijinan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	100%	-	-	100,00%
42			4. Terselenggaranya Musrenbang, Lomba - Lomba Pelayanan Perizinan, E-KTP	4 Kelurahan	4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	100%	-	-	100,00%
43			Sosialisasi - Sosialisasi, Pembinaan Kelurahan, Pembinaan RT/RW	4 kelurahan	4 kelurahan	-	4 kelurahan	100%	-	-	100,00%
44	4.01.4.01.6.06.02	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah	1. Jumlah Pelayanan Administrasi Perekaman KTP Elektronik (e-KTP)	-	-	10.000 Orang		-	4 jenis	4 jenis	
45			2. Jumlah Pelayanan Kartu Keluarga	-	-	750 Orang		-	1 kali	1 kali	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
46			3. Jumlah Pelayanan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)	-	-	500 Orang		-	4 kegiatan	4 kegiatan	
47			4. Jumlah Pelayanan Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNII)	-	-	500 Orang		-			
48	4.01.4.01.6.06.03	Pembinaan penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan	1. Jumlah Pelayanan Administrasi IMB	-	-	250 SK		-	4 jenis	4 jenis	
49			2. Jumlah Pelayanan Administrasi SITU	-	-	300 SK		-	1 kali	1 kali	
50			3. Jumlah Pelayanan Administrasi HO			100 Lembar			4 kegiatan	2 kegiatan	
51			4. Jumlah Pelayanan Rekomendasi Ijin Operasional			100 Lembar					
52			5. Jumlah Pelayanan Ijin Usaha Menengah dan Kecil (IUMK)			50 SK					
53			6. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang			1 Kegiatan					
54	4.01.4.01.6.06.04	Pembinaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah Pelayanan Adm Suket Ahli Waris	-	-	120 Berkas		-	4 jenis	4 jenis	
55			2. Jumlah Pelayanan Adm Dispensasi Nikah	-	-	100 Berkas		-	1 kali	1 kali	
56			3. Jumlah Pelayanan Adm Suket Tidak Mampu	-	-	120 Berkas		-	4 kegiatan	1 kegiatan	
57			4. Jumlah Pelayanan Legalisasi	-	-	150 Berkas		-			
58			5. Jumlah Pelayanan Adm Suket Ghaib	-	-	5 Berkas		-			
59			6. Jumlah Pendistribusian Raskin	-	-	12 Bulan		-			
60			7. Pengelolaan Data Kessos			4 Kelurahan					
61			8. Terlaksananya Keg. MTQ			1 Kegiatan					
62			9. Terlaksananya Keg. PKK Kecamatan, PKK Kelurahan dan GSI			12 Bulan					
63			10. Terlaksananya Keg. PMI			1 Kegiatan					
64	4.01.4.01.6.06.05	Pembinaan penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	1. Jumlah Pelayanan Administrasi Izin Reklame	-	-	200 Dokumen		-	4 jenis	4 jenis	
65			2. Jumlah Pelayanan SKCK			60 Orang			1 kali	1 kali	
66			3. Jumlah Pelayanan MOB (Mengumpulkan Orang Banyak)/Hiburan	-	-	15 Lembar		-	4 kegiatan	2 kegiatan	
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											

Banjarbaru, 2021

Camat Banjarbaru Utara,


Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT

NIP. 19710410 199003 1 003

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Banjarbaru Utara mempunyai 5 Program dan 12 Kegiatan dan 28 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun program yang berkaitan dengan kinerja pelayanan pada Kecamatan Banjarbaru Utara adalah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari 2 Kegiatan :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
 - Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
Indikator :
Persentase Cakupan Pelayanan Pemerintahan yang dilaksanakan
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan Non Usaha
Indikator :
Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan
 - Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
Indikator :
Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan
 - Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
Indikator :
Persentase Cakupan Pelayanan Eonomi Pembangunan yang dilaksanakan.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

Beberapa permasalahan pada yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan menjadi dasar dalam penentuan isu strategis. Isu strategis di nilai berdasarkan faktor USG yaitu *Urgensi, Seriously dan Growth*.

Berdasarkan faktor urgensi tersebut maka masalah yang menjadi isu strategis adalah

1. Rendahnya wewenang pelaksanaan Pelayanan KTP elektronik di seksi Pemerintahan dan beban waktu kerja yang lebih berat.
2. Pelayanan IMB Perumahan dan perijinan usaha yang selalu berubah kewenangan dari tahun ke tahun akibat perubahan peraturan level lebih tinggi di seksi ekonomi pembangunan.

Isu strategis tersebut dianalisis lebih dalam melalui tinjauan SWOT sebagai berikut :

1. Kekuatan (S)
 - Adanya SOP yang jelas
 - Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai.
 - Tersedianya dana belanja rutin Pemerintah Kecamatan yang dianggarkan melalui dana alokasi Umum (DAU)
 - Tersedianya SDM yang memadai
2. Kelemahan (W) .
 - Motivasi dan kemampuan aparatur pelaksana relatif belum merata.

- Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan kerja belum dapat sepenuhnya diterapkan.

3. Peluang (O)

- Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kecamatan
- Posisi Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara yang terletak di pusat Pemerintahan (Ibu Kota)
- Sosial kontrol yang berjalan baik dapat mencegah pelanggaran

4. Ancaman (T)

- Kondisi demografis masyarakat yang heterogen, baik dari jumlah penduduk maupun ragam budaya dan mata pencaharian.
- Dampak lingkungan karena sebagian besar lahan dipergunakan untuk pemukiman, bangunan pemerintah, dan prasana pelayanan publik.
- Perubahan kewenangan akibat perubahan peraturan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Bandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, lakukan langkah berikut:
 - a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Teliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
 - c. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), lakukan langkah berikut:
 - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra SKPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Teliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Teliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra SKPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;

- d. Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
8. Rumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat setiap tahun ada di kecamatan yang dihadiri oleh Dinas yang terkait. Usulan dari kelurahan ditampung dikecamatan kemudian diusulkan ke pemerintah kota Banjarbaru. Usulan tersebut oleh pemerintah akan di seleksi lagi untuk menentukan usulan yang termasuk prioritas dan yang akan dilaksanakan.

Berikut ini tabel yang diusulkan masyarakat melalui Kecamatan Banjarbaru Utara :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Nama SKPD : Kecamatan Banjarbaru Utara

No	Rancangan Awal RKPD				
	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Kec. Bjb Utara	BB	5.679.591.239,00
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD		100%	18.750.000,00
3	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		3 dok	10.500.000,00
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		2 Dok	8.250.000,00
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100%	5.242.275.739,00
6	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		54 Orang	5.223.175.739,00
7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		4 Laporan	11.000.000,00
8	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun akhir tahun sesuai ketentuan		1 Laporan	8.100.000,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	164.245.500,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2 paket	22.000.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 paket	16.500.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		120 Dok	2.749.500,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		4 paket	86.000.000,00
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		4 laporan	36.996.000,00
12	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan barang penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kec. Bjb Utara	100%	82.632.000,00
13	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			23.064.000,00

14	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			28.400.000,00
15	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			31.168.000,00
17	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi		100%	103.200.000,00
18	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan		4 jenis	64.800.000,00
19	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa pelayanan umum kantor lainnya		4 orang	38.400.000,00
20	Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik		100%	68.488.000,00
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	24.694.000,00
22	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan padak dan perizinannya		8 unit	34.794.000,00
23	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Bjb Utara	1 paket	4.000.000,00
24	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		18 unit	5.000.000,00
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		86,5	1.601.660.000,00
		Indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik		81,5	
26	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Bjb Utara	85%	1.471.660.000,00
27	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah kegiatan musrenbang/koordinasi yang dilaksanakan		2 keg	29.000.000,00
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah pelayanan pemerintahan yang dilaksanakan		4 jenis	1.442.660.000,00
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelayanan yang dilaksanakan		100%	130.000.000,00
28	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelayanan ekobang yang dilaksanakan		4 jenis	35.000.000

	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah pelayanan kesos yang dilaksanakan		4 jenis	40.000.000
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha	jumlah pelayanan tramtib yang dilaksanakan		3 jenias	55.000.000
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri		12 RT	143.580.000,00
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase tindak lanjut pembinaan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi		100%	7.000.000,00
	Evaluasi Kelurahan	jumlah kelurahan yang di evaluasi		4 kelurahan	7.000.000,00
30	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat tingkat kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100%	136.580.000,00
	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan		2 lembaga	136.580.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan		100%	35.000.000,00
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi		100%	35.000.000,00
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	jumlah koordinasi tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan penegakan peraturan		4 kegiatan	35.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase koordinasi yang terlaksana		100%	20.000.000,00
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase jumlah koordinasi yang terlaksana		100%	20.000.000,00
	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan		6 kegiatan	20.000.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru, dan di atur lagi dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru. Dimana Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan walikota, sesuai karakteristik wilayahnya.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun 2022, rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, ekonomi kreatifitas, dan inovasi teknologi, dan 3 (tiga) bidang lainnya, yaitu (1) Bidang politik, hukum dan keamanan; (2) politik, hukum dan keamanan; dan (3) bidang Kesejahteraan rakyat.

Dalam hal potensi pengembangan wilayah, Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru, telah membagi rencana struktur ruang Kota Banjarbaru dimana yang menjadi Pusat Pelayanan Kota (PPK I) berada di Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara.

Selain itu, potensi pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh keberadaan kawasan strategis. Kawasan strategis adalah kawasan yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diantaranya adalah Hutan Kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tertib administrasi dalam proses maupun produk pelayanan yang memberikan kepastian hukum sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas adalah dengan meningkatkan SDM yang berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memperoleh pelayanan berkualitas adalah dengan mewujudkan pelayanan dan pelaksanaan tata pemerintah yang baik.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang amanah adalah dengan membangun lingkungan yang sehat dan dinamis.
4. Mengembangkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan menumbuhkembangkan ekonomi berbasis masyarakat.

Adapun sasaran prioritas yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendataan masyarakat potensial.
2. Pelaksanaan pelatihan bekerjasama dengan instansi terkait.
3. Sosialisasi program pemerintah yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi.

4. Peran serta aktif dalam perusahaan perencanaan peningkatan SDM masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6. Melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelayanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Banjarbaru Utara.
8. Mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Mewujudkan pelaksanaan pemerintah pembangunan dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.
10. Meningkatkan pelayanan publik.
11. Meningkatkan disiplin kerja dan loyalitas aparatur.
12. Pelaksanaan kebersihan missal di level kecamatan setiap kelurahan secara berkala.
13. Pelaksanaan penghijauan terhadap lokasi yang tepat guna menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat.
14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan kebersihan sungai dan drainase.
15. Peran serta aktif dalam perumusan perencanaan pembangunan lingkungan yang sehat.
16. Pelaksanaan dan pinjaman bergulir berbasis potensi masyarakat.
17. Pelaksanaan pembinaan perkoperasian.
18. Pelaksanaan pembinaan pasar tradisional.
19. Peran serta aktif dalam perumusan perencanaan pembinaan perekonomian.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ada 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran.
- 3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3). Pengadaan Mebel

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 4). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- 1). Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah & Instansi Vertikal Terkait
- 2). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat

Sub Kegiatan :

- 1). Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain
- 2). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan
- 3). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Usaha

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

- 1). Evaluasi Kelurahan
- 2). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- 1). Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan :

- 1). Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- 1). Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. Indikasi Rencana Program Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banjarbaru

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarbaru Utara
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Banjarbaru**

KECAMATAN BANJARBARU UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.753.500.000	PAD			7.425.010.000
7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Kecamatan Banjarbaru Utara	B	18.750.000	PAD		A	20.625.000
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	10.500.000	PAD		3 Dokumen	11.550.000
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi		3 Dokumen	8.250.000	PAD		3 Dokumen	9.075.000
7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah		WTP	6.409.400.000	PAD		100%	7.050.340.000
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	6.390.000.000	PAD		1 Tahun	7.029.000.000
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Inventaris Barang			11.000.000	PAD		5 Dokumen	12.100.000
	09 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan		1 Dokumen	8.400.000	PAD		1 Dokumen	9.240.000
7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Internal		100%	164.250.000	PAD		100 %	178.825.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1 Tahun	22.000.000	PAD		1 Tahun	24.200.000
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	16.500.000	PAD		1 Tahun	18.150.000
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Tahun	2.750.000	PAD		1 Tahun	3.025.000
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		1 Tahun	86.000.000	PAD		1 Tahun	94.600.000
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		1 Tahun	37.000.000	PAD		1 Tahun	38.850.000
7 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				106.400.000	PAD			115.120.000
	05 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	68.000.000	PAD		1 Tahun	74.800.000
	02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas Kebersihan dan Pengamanan Kantor		1 Tahun	38.400.000	PAD		1 Tahun	40.320.000
7 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100%	54.700.000	PAD		100%	60.100.000
	29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan dalam Kondisi Baik		1 Unit	23.700.000	PAD		1 Unit	26.000.000
	30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik		8 Unit	22.000.000	PAD		8 Unit	24.200.000
	32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik		3 Jenis	4.000.000	PAD		3 Jenis	4.400.000
	34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik		1 Jenis	5.000.000	PAD		1 Jenis	5.500.000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat		85	1.065.690.000	PAD		85	1.121.489.000
7 01 02 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			1.013.990.000	PAD			1.064.689.000
	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan		4 Kegiatan	1.013.990.000	PAD		4 Kegiatan	1.064.689.000
		Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan		4 Jenis				4 Jenis	
		Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan		1 Kali				2 Kali	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Utara tahun 2022 Kota Banjarbaru merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2021-2026 dan merupakan rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun.

Dengan tersusunnya penjelasan umum Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2022 telah mempunyai pedoman kedepan, sehingga program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Rencana Kerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2022 ini diharapkan dapat terimplementasi langsung kepada masyarakat dan atau lingkungan Kota Banjarbaru.

Masukan yang berarti dan bermanfaat, sangat kami perlukan untuk langkah kedepan sehingga dapat memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas.